

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS SOSIAL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS SOSIAL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

Era reformasi di bidang pengelolaan keuangan Negara/Daerah merupakan satu agenda yang terus dilaksanakan Pemerintah Indonesia termasuk pembaharuan landasan hukum. Pembaharuan ini dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tahun tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

. Selanjutnya juga dengan terbitnya regulasi Otonomi Daerah yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mendorong aparatur Negara untuk mewujudkan administrasi pemerintah yang baik.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka dengan adanya reformasi di bidang pengelolaan keuangan Negara/Daerah yang salah satu agendanya adalah implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Akuntansi berbasis akrual mencatat transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan, sehingga basis akrual ini akan dapat memberikan gambaran secara utuh terkait kinerja dan posisi keuangan serta arus kas pemerintah. Sehingga setiap Negara diwajibkan untuk menyajikan informasi Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak hanya terbatas untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya.

Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, Laporan Keuangan harus dibuat Catatan Atas laporan Keuangan (CALK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Temanggung dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten temanggung Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 ; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020.
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;

C. SISTEMATIKA

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020, secara sistematis terdiri atas :

- | | |
|---------|--|
| Bab I | : Pendahuluan |
| Bab II | : Penjelasan Pos – pos Laporan Keuangan |
| Bab III | : Penjelasan atas Informasi-informasi non keuangan |
| Bab IV | : Penutup |

BAB II

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. PENDAPATAN

Untuk Dinas Sosial tidak terdapat pendapatan daerah .

2. BELANJA DAERAH

Belanja Daerah terdiri dari :

2.1. Belanja Tidak Langsung

2.2. Belanja Langsung

2.1. Belanja Tidak Langsung

2.1.1. Belanja Pegawai

2.1.2. Belanja Hibah

2.1.3. Belanja Bantuan Sosial

2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan Realisasi TA 2020 sebesar Rp 3.678.485.381, atau 95,38 % dari anggaran Rp 3.856.86.104 ,- dan 93,51 % dari realisasi TA 2019 sebesar Rp 3.089.513.397 ,- sebagai berikut :

Belanja Pegawai	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Gaji dan Tunjangan	2.221.711.872	2.139.464.713	2.189.873.490
Tambahan Penghasilan PNS	1.635.138.232	1.539.020.668	1.335.673.860
Jumlah	3.856.850.104	3.678.485.381	3.525.547.350

2.1.2. Belanja Hibah

Untuk Tahun anggaran 2020, di Dinas Sosial terdapat Belanja Hibah Urusan Sosial yaitu Bantuan Sosial bagi Panti di APBD Penetapan.

Belanja Hibah bagi panti sebagai berikut :

Belanja Sosial	2020		Keterangan
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
PA.Pangrekso Dalem Betlehem	30.000.000	30.000.000	
PA. Darul Mutaqien Bolong Ngaditirto Selopampang	30.000.000	30.000.000	

PA. Suryani Sunan Plumbon Tembarak	30.000.000	30.000.000	
PAY Muhammadiyah Putri Kertosari Temanggung	30.000.000	30.000.000	
Jumlah	120.000.000	120.000.000	

Realisasi Rp 120.000.000,- atau 100 % dari anggaran Rp 120.000.000,-
Bantuan sosial untuk sarana dan prasarana bagi 4 Panti di Kabupaten
Temanggung.

2.1.3. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial meliputi Belanja Sosial Urusan sosial dengan
realisasi Tahun 2019 dan Tahun 2020, sebagai berikut :

Belanja Sosial	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Bantuan Sosial untuk permakanan anak panti asuhan	1.112.520.000	835.152.000	1.015.612.500
Bantuan Pengembangan KUBE	25.000.000	25.000.000	50.000.000
Jaminan Sosial bagi Penyandang disabilitas cacat berat dan ganda	360.000.000	354.600.000	354.600.000
Jaminan Sosial LU Non Potensial	720.000.000	703.800.000	702.000.000
Bantuan Stimulan UEP bagi Keluarga Fakir Miskin (FM)	45.000.000	45.000.000	150.000.000
Bantuan Sosial bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	45.000.000	45.000.000	174.000.000
Bantuan Sosial UEP untuk Lanjut Usia Terlantar (LUT) Potensial	45.000.000	45.000.000	150.000.000
Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin Rawan Sosial Perdesaan Tepi Hutan	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	-	-	10.162.500.000
Santunan duka cita	4.500.000.000	3.484.500.000	3.000.000.000

Bantuan Sosial bagi Korban Perdagangan Orang	50.000.000	50.000.000	-
Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Fisik,Intelektual,Mental dan Sensorik	125.000.000	125.000.000	-
Bantuan Sosial bagi Anak Terlantar,Anak Jalanan dan Anak yg bermasalah dgn Hukum	125.000.000	120.000.000	-
Jumlah	7.182.520.000	5.863.052.000	15.788.712.500

Belanja Bantuan Sosial TA 2020 dengan realisasi Rp 5.863.052.000 ,- atau 81,62% dari anggaran Rp 7.181.520.000 ,- dan 98,37 % dari realisasi TA 2019 sebesar Rp 15.788.712.500,-

Adapun realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 terdiri dari :

a. Belanja bantuan organisasi kemasyarakatan.

Bantuan Sosial untuk permakanan anak panti asuhan :

- Realisasi Rp 835.152.000 ,- atau 75 % dari anggaran sebesar Rp 1.112.520.000 ,-
- Penerima bantuan 381 anak @ Rp 8.000 per hari selama satu tahun;
- Pencairan dilaksanakan 2 kali yaitu di bulan Oktober dan Desember 2020.
- Sisa Anggaran tidak dicairkan karena kurang lebih 4 bulan dari bulan Maret – Juni 2020 masa pandemi covid 19 anak panti tidak ditempat.

b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat

Bantuan Sosial Pengembangan KUBE :

- Realisasi Rp 25.000.000 ,- atau 100 % dari anggaran Rp 25.000.000 ,-
- Penerima bantuan 1 kelompok di desa Gentingsari Kecamatan Bansari;
- Pencairan Dilaksanakan 1 kali di bulan November 2020

c. Belanja bantuan sosial kepada masyarakat terdiri dari :

1) Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat, dan Ganda :

- Realisasi Rp 354.600.000 , - atau 96,50 % dari anggaran Rp 360.000.000,-

- Penerima bantuan 197 orang @ Rp 1.800.000,- dari calon penerima 200 orang;
 - Pencairan dilaksanakan 2 kali yaitu di bulan Oktober dan Desember 2020;
 - 3 orang tidak pencairan karena meninggal dunia
- 2) Jaminan Sosial Lanjut Usia Non Potensial
- Realisasi Rp 703.800.000 ,- atau 97,75 % dari anggaran sebesar Rp 720.000.000 ,-
 - Dari pencairan sebesar Rp 703.800.000,- untuk penerima bantuan 391 orang dari ;
 - Calon penerima 400 orang @ Rp 1.800.000,-
 - Pencairan dilaksanakan 2 kali di bulan November dan Desember 2020;
 - Dan di anggaran perubahan tidak dicairkan 9 orang karena meninggal dunia.
- 3) Bantuan Stimulan UEP bagi Keluarga Fakir Miskin (FM)
- Realisasi Rp 43.500.000 ,- atau 96,6 % dari anggaran Rp 45.000.000 ,-
 - Penerima bantuan 29 orang dari 30 calon penerima @ Rp. 1.500.000 di 3 desa 2 Kecamatan;
 - Pencairan dilaksanakan 1 kali di bulan November 2020;
 - Sejumlah Rp 1.500.000 disetor ke kasda karena 1 penerima manfaat merantau.
- 4) Bantuan stimulan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)
- Realisasi Rp 45.000.000 ,- atau 100 % dari anggaran Rp 45.000.000 ,-
 - Jumlah Penerima 30 orang dari 30 calon penerima, per orang Rp 1.500.000 ,-
 - Berada di 3 desa di Kecamatan Kaloran;
 - Pencairan dilakukan 1 kali di bulan November 2020.
- 5) Bantuan Sosial UEP untuk Lanjut Usia terlantar (LUT) Potensial
- Realisasi Rp45.000.000,- atau 100% dari anggaran Rp45.000.000 ,-
 - Jumlah Penerima 30 orang dari 30 calon penerima, per orang Rp 1.500.000 ,-
 - Berada di 3 desa di Kecamatan Selopampang;
 - Pencairan dilakukan 1 kali di bulan November 2020.

6) Bantuan Sosial bagi Keluarga Miskin Rawan Sosial Perdesaan Tepi Hutan

- Realisasi Rp30.000.000,- atau 100% dari anggaran Rp30.000.000,-
- Penerima bantuan 20 orang di Desa Banaran Kecamatan Tembarak @Rp 1.500.000,-
- Pencairan dilakukan 1 kali di bulan November 2020.

7) Santunan Kematian

- Realisasi Rp3.484.500.000,- atau 77,43% dari anggaran Rp4.500.000.000,-
- Penerima bantuan 2.323 orang dari calon penerima 3.000 orang;
- Lokasi di 269 desa atau kelurahan dari 20 Kecamatan @Rp1.500.000,-

8) Bantuan Sosial bagi Korban Perdagangan Orang

- Realisasi Rp50.000.000,- atau 100% dari anggaran Rp50.000.000,-
- Penerima bantuan 10 orang di 10 desa 8 Kecamatan @Rp5.000.000,-
- Pencairan dilakukan 1 kali di bulan November 2020.

9) Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Fisik,Intelektual,Mental dan Sensorik

- Realisasi Rp125.000.000,- atau 100% dari anggaran Rp125.000.000,-
- Realisasi Rp 125.000.000,- atau 100% dari anggaran Rp125.000.000,-
- Pencairan dilakukan 1 kali di bulan November 2020.

10) Bantuan Sosial bagi Anak Terlantar,Anak Jalanan dan Anak yang berhubungan dengan hukum

- Realisasi Rp120.000.000,- atau 96 % dari anggaran Rp 125.000.000,-
- Penerima bantuan 24 org dari 25 calon penerima di 21 desa 10 Kecamatan @ Rp 5.000.000,-
- Pencairan dilakukan 1 kali di bulan November 2020 ;
- Satu orang tidak bisa dicairkan karena tidak lolos verifikasi usia sudah tidak masuk kriteria anak.

2.2. Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal yang terdapat pada 9 Program dari 50 kegiatan dengan realisasi TA 2020 dan TA 2019 sebagai berikut :

NO	Uraian	2020		2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Pegawai	4.817.560.104	4.596.010.381	845.248.900
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.169.351.770	1.121.960.928	2.436.195.157
3.	Belanja Modal	110.554.000	104.476.000	1.492.530.702
	Jumlah	6.097.465.874	5.822.447.309	4.773.974.759

Untuk Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020 realisasinya Rp 5.822.447.309,- atau 95,49% dari anggaran sebesar Rp 6.097.465.874 ,- dan 91,24 % dari realisasi TA 2019 sebesar Rp 845.824.900,-

2.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 Rp 4.596.010.381,- atau 95,40 % dari anggaran sebesar Rp 4.817.560.104 ,- dan 96,24 % dari realisasi TA 2019 sebesar Rp 845.824.900,-

Belanja Pegawai	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Honorarium PNS	3.856.861.104	3.678.485.381	69.490.000
Honorarium Non PNS	960.699.000	917.525.000	775.758.900
Jumlah	4.817.560.104	4.596.010.381	845.248.900

2.2.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa realisasi Tahun Anggaran 2020 Rp1.121.960.928,- atau 96% dari anggaran sebesar Rp1.169.351.770,- dan 91,36% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp2.436.195.157,-

Belanja Barang dan Jasa	2020		2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja bahan pakai habis	140.633.650	135.848.450	227.487.605
Belanja bahan material	43.921.800	43.781.200	67.444.785
Belanja jasa kantor	91.619.000	84.209.134	118.028.225
Belanja premi asuransi	39.840.000	36.466.413	22.075.940

Belanja perawatan kendaraan bermotor	73.124.900	71.360.825	91.300.275
Belanja cetak dan penggandaan	105.733.600	103.431.200	99.001.200
Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	191.400.000	189.000.000	416.390.000
Belanja sewa mobilitas darat	36.000.000	36.000.000	63.180.000
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan	-	-	11.550.000
Belanja makanan dan minuman	97.762.000	86.522.000	254.603.000
Belanja pakaian kerja	1.530.000	1.450.000	600.000
Belanja pakaian dinas dan atributnya	9.000.000	7.000.000	-
Belanja pakaian khusus dan hari hari tertentu	8.932.000	8.932.000	43.250.000
Belanja perjalanan dinas	219.557.520	207.664.706	580.728.027
Belanja kursus ,pelatihan,sosialisasi dan bintek	68.020.000	68.020.000	312.650.000
Belanja barang yang akan diserahkan kpd masy.	42.277.300	42.275.000	62.035.350
Belanja Jasa konsultssi	-	-	65.870.750
Total	1.169.351.770	1.121.960.928	2.436.195.157

2.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 Rp104.476.000 ,- atau 95 % dari anggaran sebesar Rp110.554.000 ,-

Belanja Modal	2020	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
a. Tanah	-	-
b. Peralatan dan Mesin	110.554.000	104.476.000
c. Gedung dan Bangunan		
d. Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-
e. Aset Tetap Lainnya	-	-
f. Aset lainnya	-	-
Total	110.554.000	104.476.000

B. PENJELASAN LAPORAN NERACA

1. ASET LANCAR

1.1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas	2020 (Rp)	2019 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	42.250
Jumlah Kas dan Setara Kas	-	42.250

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 0,-

1.2. Persediaan

NO	Persediaan	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1.	Alat listrik dan elektronik	12.000,00	1.093.900
2.	Alat Tulis Kantor	576.200,00	5.470.700
3.	Perangko, materai dan benda pos lainnya	1.428.000,00	162.000
4.	Belanja perlengkapan kantor lainnya		-
5.	Belanja cetak	535.200,00	3.492.700
6.	Peralatan kebersihan dan bhn pembersih	530.200,00	576.200
7.	Belanja alat penerangan dan kelengkapannya	921.500,00	195.800
8.	Bahan makanan	108.000,00	-
9.	Persediaan Alat-alat dapur		9.700.000-
10.	Bahan lainnya		84.000
11.	Barang yang diserahkan kepada masyarakat	4.735.000,00	23.685.000
12.	Bahan/bibit tanaman		-
13.	Persediaan suku cadang alat kedokteran		-
	Jumlah Persediaan	8.846.100	44.660.300

Saldo persediaan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2020 sebesar Rp 8.846.100 ,- yang merupakan barang yang mempunyai sifat pakai habis.

2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Untuk Dinas Sosial tidak terdapat Investasi Jangka Panjang karena tidak ada aset yang untuk memperoleh nilai ekonomi.

3. ASET TETAP

Posisi jenis dan nilai aset tetap yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten

Temanggung per 31 Desember 2020 sebesar Rp 8.961.467.585 ,- dan per 31

Desember 2019 sebesar Rp 8.816.258.085 yang tersaji sebagai berikut :

Aset Tetap	2020 (Rp)	2019 (RP)
a. Tanah	1.301.990.000,00	1.301.990.000,00
b. Peralatan dan Mesin	3.798.478.683 ,00	3.673.269.183,00
<i>Penyusutan</i>		(2.892.953.292,14)
c. Gedung dan Bangunan	3.620.109.115,00	3.620.109.115,00
<i>Penyusutan</i>		(1.534.535.438,17)
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	235.543.887 ,00	235.543.887 ,00
<i>Penyusutan</i>		(117.962.112,66)
e. Aset tetap lainnya	5.345.900,00	5.345.900,00
f. Konstruksi dalam pengerjaan	-	-
Jumlah aset	8.961.467.585,00	8.836.258.085,00

Mutasi Aset Tetap dalam Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Mutasi Aset Tetap selama tahun 2020				
Aktiva Tetap	Saldo awal 2019	Penambahan	Pengurangan/ penyusutan	Saldo Akhir
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Tanah	1.301.990.000,00	-	-	1.301.990.000,00
Peralatan dan Mesin	3.673.269.183,00	125.209.500,00	-	3.798.478.683,00
Gedung dan Bangunan	3.620.109.115,00	-	-	3.620.109.115,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	235.543.887 ,00	-	-	235.543.887 ,00
Aset tetap lainnya	5.345.900,00	-	-	5.345.900,00
Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah	8.836.258.085,00	125.209.500,00	-	8.961.467.585,00

Mutasi aset tetap sebesar Rp 125.209.500 yang berasal dari belanja modal Rp

104.476.000 dan dropping aset dari Setda sebesar Rp 18.700.000 dan dropping

dari Dinkes Rp 2.033.500,- dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tanah

Saldo akhir tahun Aset Tanah Tahun 2019 sebesar Rp 1.301.990.000 ,- dengan perincian sebagai berikut :

a.	Tanah Makam Pahlawan	129.150.000
b.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.113.000.000
c.	Tanah Bangunan Pelatihan (Ds. Wanutengah Bulu)	9.840.000
d.	Tanah Bangunan Pelatihan (Kel. Sidorejo Temanggung)	<u>50.000.000</u>
Jumlah		1.301.990.000

Tanah :

- Saldo Awal	Rp 1.301.990.000,-
- Mutasi	Rp -
- Saldo Akhir	Rp 1.301.990.000,-

b. Peralatan dan Mesin

Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2020 adalah didasarkan pada neraca awal dan terdapat penambahan ataupun pengurangan/penyusutan. Adapun nilai dari peralatan dan mesin sebesar Rp 3.796.445.183 dengan perincian sebagai berikut :

Peralatan dan Mesin		
Saldo Awal 2019		3.673.269.183,00
Penambahan 2020		
Pengadaan 2020	104.476.000,00	
mutasi dari Setda dan Dinkes	20.733.500 ,00	125.209.500,00
Jumlah		3.798.478.683 ,00
Pengurangan :		
Penyusutan :	-	
dikeluarkan ke bahan pakai habis	-	-
Jumlah		3.798.478.683 ,00

Untuk Aset peralatan dan mesin tahun 2020 terdapat penambahan sebesar Rp 125.209.500,00 yang berasal dari dropping Setda berupa 1 buah sepeda motor sebesar Rp 18.700.000 , dropping dari Dinkes berupa 1 buah Thermogun Rp 2.033.500 dan belanja pengadaan sebesar Rp 104.476.000,00.

c. Gedung dan Bangunan

Aset Gedung dan Bangunan terdapat perubahan yaitu adanya penambahan dan pengurangan /penyusutan per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

Saldo awal 2020	3.620.109.115,00
Penambahan 2020	-
Jumlah	3.620.109.115,00
Penyusutan	-
Jumlah per 31 Desember 2020	3.620.109.115,00

d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Aset jalan, jaringan dan irigasi terdapat perubahan yaitu adanya penambahan dan pengurangan /penyusutan per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

Saldo awal 2020	235.543.887,00
Penambahan 2020	-
Jumlah	235.543.887,00
Penyusutan	-
Jumlah	235.543.887,00

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya Tahun 2020 sebesar Rp 5.345.900 ,- yaitu merupakan buku - buku perpustakaan, terdapat perubahan penambahan sampai dengan per 31 Desember 2020.

Saldo awal		5.345.900
Penambahan 2020		=
Saldo akhir		5.345.900
Pengurangan :		
reklas ke KIB B	-	
reklas ke ekstrakomtabel	-	=
Jumlah		5.345.900

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Untuk konstruksi dalam pengerjaan Dinas Sosial tidak terdapat bangunan dalam pengerjaan atau **nihil**.

4. ASET LAINNYA

Aset Lainnya berupa aset tak berujud dan aset rusak, terdapat perubahan yaitu adanya penambahan berikut :

Saldo awal 2019		12.500.000
terdiri dari :		
- Aset tak berujud	10.000.000	
(Penyusutan)	-	
- Aset rusak	2.500.000	
(Penyusutan)	-	
Penambahan 2020		=
Jumlah per 31 Desember 2020		12.500.000

BARANG EKSTRAKOMTABLE

Aset tetap yang nilainya dibawah batas materialitas aset tetap dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomtabel dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB). Daftar barang milik daerah ekstrakomtabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria materialitas.

Barang ekstrakomptabel meliputi :

- a. Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan nilai batas materialitas Rp 200.000,-
- b. Aset Tetap Lainnya pada kelompok barang bercorak kebudayaan dengan nilai batas materialitas Rp 200.000,-

Saldo barang ekstrakomtabel per 31 Desember 2020 sebesar Rp 52.419.505,-

Saldo awal	52.419.505
Penambahan 2020	-
Saldo per 31 Desember 2020	52.419.505

5. KEWAJIBAN

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp 192.042.563,- terdiri dari Utang Belanja Pegawai dan Utang Barang dan Jasa dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Utang Belanja Pegawai dan Belanja barang dan Jasa

Merupakan utang belanja bulan Desember tahun 2020 terdiri dari :

1. Belanja TPP	Rp	115.912.348
2. Belanja honorarium pegawai honorer/ tidak tetap	Rp	64.415.000
3. Upah Tenaga Kerja	Rp	3.380.000
4. Belanja Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp	5.481.001
5. Belanja iuran BPJS	Rp	2.854.304

Jumlah	Rp 192.042.653
---------------	-----------------------

Dengan Perincian sebagai berikut :

- 1) Belanja TPP bulan Desember 2020 Rp 115.912.348
- 2) Belanja honorarium pegawai honorer/tidak tetap dan upah tenaga kerja bulan Desember 2020 :

-	Petugas kebersihan	Rp	3.380.000
-	Kegiatan Pengelola data kemiskinan	Rp	2.000.000
-	Kegiatan Operasional RPS	Rp	13.585.000
-	Kegiatan pelayanan perkantoran	Rp	35.350.000
-	Kegiatan jasa pengamanan kantor	Rp	10.110.000
Jumlah		Rp	67.795.000

- 3) Upah tenaga kerja pemeliharaa TMP Prayudha Mudal dan Bambang Sugeng Kranggan Rp 3.380.000,-

- 4) Belanja Iuran BPJS :

-	BPJS Kesehatan		
	Petugas kebersihan	Rp	146.016
	Kegiatan Pengelola data kemiskinan	Rp	80.000
	Kegiatan Operasional RPS	Rp	584.064
	Kegiatan pelayanan perkantoran	Rp	1.606.176
	Kegiatan jasa pengamanan kantor	Rp	438.048
Jumlah		Rp	2.854.304

- 5) Belanja penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik bulan Desember 2020:

-	Rekening Telepon	Rp	166.570
-	Rekening Air	Rp	1.061.200
-	Rekening Listrik	Rp	1.746.026
-	Speedy/internet	Rp	2.507.205
Jumlah		Rp	5.481.001

6. EKUITAS

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih yang terdapat pada SKPD yaitu sebesar Rp 4.186.779.328,03

C. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah merupakan realisasi dari pelaksanaan kegiatan. Adapun laporan operasional disajikan sebagai berikut :

1. PENDAPATAN LO

Pendapat LO pada Dinas Sosial sebesar Rp 0,-

2. BEBAN LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintahan selama 1

tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

Beban LO	2020
Beban Pegawai	4.637.863.169,00
Beban Barang dan Jasa	1.159.276.779,00
Beban penyusutan dan amortisasi	-
Jumlah	5.797.863.169,00

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas awal pada laporan perubahan ekuitas sebesar Rp 4.186.779.328,03 ,- berasal dari nilai ekuitas akhir tahun anggaran 2019. Ekuitas akhir merupakan penjumlahan dari ekuitas awal ditambah dengan surplus/defisit sebesar Rp 5.797.139.948 ,- , yang timbul merupakan selisih antara jumlah pendapatan yang diterima dikurangi jumlah beban pada laporan operasional. Laporan perubahan ekuitas dipengaruhi factor pengurang dan penambah merupakan dampak komulatif perubahan kebijakan akuntansi sebesar Rp 20.733.500,-, dan Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp5.822.447.309 sehingga ekuitas akhir per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.232.820.189,03.

BAB III

PENJELASAN ATAS INFORMASI KEUANGAN SKPD

DOMISILI DAN BENTUK HUKUM ENTITAS

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68) dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung berdomisili di Jalan Pahlawan No 4 A Temanggung.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung selaku entitas akuntansi. Hasil akhir laporan keuangan Dinas Sosial berupa : LRA Belanja, Rekap SP2D dan SPJ, Laporan Operasional (LO), Neraca dan Kertas Kerja Ekuitas (LPE), Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) .

Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang berakhir 31 Desember 2020, memuat informasi-informasi penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah .

Temanggung, Desember 2020

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



